

# **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK USAHA KECIL DAN MIKRO**

(Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah)

Oleh

**Ravik Karsidi**

DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR NASIONAL  
“PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA”

---

PROGRAM STUDI ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN  
SEKOLAH PASCASARJANA IPB  
Bogor, 21 September 2005

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK USAHA KECIL DAN MIKRO (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah)

**Ravik Karsidi<sup>1</sup>**

### ABSTRAK

Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha kecil dan mikro (UKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja.

Kecenderungan kemampuan UKM memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara sehingga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan tahun 2004 sebagai tahun *International microfinance*. Sejalan dengan program PBB tersebut, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan tahun 2005 sebagai “**Tahun UMKM Indonesia**”.

Makalah singkat ini menyajikan uraian tentang dinamika keterlibatan dan hubungan peran antar *stakeholder* UKM, pemberdayaan masyarakat untuk UKM dan beberapa pengalaman empiris.

Terdapat banyak *stakeholder* yang harus terlibat dalam pemberdayaan masyarakat untuk UKM, antara lain dapat dilakukan langkah-langkah dengan melalui kegiatan: (1) identifikasi potensi, (2) analisis kebutuhan, (3) rencana kerja bersama, (4) pelaksanaan, (5) monitoring dan evaluasi.

Dari dua pengalaman empiris dapat ditarik pengalaman bahwa kerjasama antar *stakeholder* UKM akan menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk pengembangan UKM. Untuk itu, maka program-program yang menyangkut pengembangan UKM baik yang bersifat *technical asistant* (TA) maupun yang non TA harus diupayakan adanya koordinasi antar *stakeholder* agar optimal hasilnya.

Implementasi kebijakan dalam rangka strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan UKM tidak bisa secara parsial hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan UKM baik secara individu maupun kelompok, termasuk mendasarkan pada potensi sumberdaya manusianya.

Dengan melibatkan secara partisipatif dan lebih bersifat *bottom up* ternyata pemberdayaan diri UKM telah berhasil dan pada gilirannya secara intergral mampu memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian yang lebih luas.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Masyarakat, UKM, dan pengembangan SDM.*

### A. PENDAHULUAN

Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup

<sup>1</sup> Guru Besar FKIP UNS dan Ketua Program Studi S2 Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Manajemen Pengembangan Masyarakat Program Pascasarjana UNS Solo. Pernah bekerja sebagai *Deputy Team Leader* dan *Training Specialist* pada Proyek Kredit Mikro Bank Indonesia, Jakarta 1996 – 2001. Alumni S<sub>3</sub> Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB tahun 1999, pada saat ini Pembantu Rektor I UNS.

signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah UKM secara nasional ada 42,4 juta dengan memberikan sumbangan terhadap PDB mencapai Rp.1.013,5 trillun (56,7% dari total PDB) dan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa (BDS LPPM UNS, 2005).

Kecenderungan kemampuan UKM memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang namun juga terjadi di negara-negara maju pada saat-saat negara tersebut membangun kemajuan perekonomiannya sampai sekarang. Kondisi demikian mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan tahun 2004 sebagai tahun *International microfinance*. Hal ini dimaksudkan tidak saja untuk menunjukkan keberpihakan badan dunia tersebut terhadap UKM namun juga dalam rangka mendorong negara berkembang untuk lebih memberikan perhatian pada pemberdayaan UKM dengan cara memberikan berbagai stimulan dan fasilitasi.

Sejalan dengan program PBB tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan tahun 2005 sebagai “**Tahun UMKM Indonesia**” dengan melakukan berbagai instrumen dan program fasilitasi pemberdayaan UKM di tingkat nasional, sedangkan untuk di daerah diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Makalah singkat ini menyajikan uraian tentang dinamika keterlibatan dan hubungan peran antar *stakeholder* UKM, pemberdayaan untuk UKM dan beberapa pengalaman empiris.

## **B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Menurut Korten (1984), masa pasca industri akan menghadapi kondisi-kondisi baru yang sama sekali berbeda dengan kondisi di masa industri, dimana potensi-potensi baru penting dewasa ini memperkokoh kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian umat manusia. Titik pusat perhatiannya adalah pada pendekatan ke arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Logika paradigma ini yang menonjol adalah logika lingkungan hidup manusia yang berimbang; sumber dayanya yang dominan adalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis; dan sasarannya yang dominan adalah pertumbuhan umat manusia yang dirumuskan dalam rangka lebih terealisasinya potensi umat manusia. Individu bukanlah sebagai obyek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri.

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi produk-produknya. Keefisienan sistem produksi, karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang disediakan bagi para pesertanya, dan berdasar kemampuannya menyertakan segenap anggota masyarakat. Salah satu perbedaan penting antara pembangunan yang memihak rakyat dan pembangunan yang mementingkan produksi ialah bahwa yang kedua itu secara terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan sistem agar sistem produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat (Korten, 1984).

Paradigma pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Pemahaman akan paradigma itu penting artinya bagi pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mementingkan rakyat.

Penyadaran diri merupakan satu di antara argumen-argumen yang paling telak dan tajam diajukan oleh Freire (1984), adalah merupakan inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala masyarakat yang tersekap dalam kemiskinan dan kelemahan lainnya harus diubah kearah suatu keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan, bahwa hal-hwal tersebut dapat menjadi lain, dan pasti tersedia alternatif-alternatif untuk mengatasinya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (1999), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat (Karsidi, 1988), sebagai berikut:

1. Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga dapat memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, pengetahuan modern dan inovasi dari luar malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

### C. STAKEHOLDER UKM DAN HUBUNGAN ANTAR PERAN

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk UKM keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Semua peran dan keterlibatan *stakeholder* UKM berkembang sesuai dengan cara pandang mereka terhadap UKM. Adapun keterlibatan *stakeholder* UKM dalam pemenuhan kebutuhan pemberdayaan masyarakat untuk UKM yang sudah terjadi dan banyak dilakukan selama ini, dapat diidentifikasi seperti tertera pada tabel 1. Keterlibatan tersebut masih sendiri-sendiri dan kurang intergratif antara *stakeholder* satu dengan yang lain.

Tabel 1. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pemberdayaan UKM dari berbagai Instansi terkait (*Stakeholder*)

No.	Kebutuhan Pembelajaran	Keadaan Sekarang	
		Instansi	Spesifikasi Pelayanan
1.	Kemampuan Teknologi	- Disperindagkop dan PKM - Perguruan Tinggi - LSM - Sekolah Kejuruan, Disnaker	- Pelatihan - Pembinaan - Pengabdian Masyarakat - Bimbingan usaha - Pelatihan - Kursus - Magang
2.	Pengetahuan Permodalan	Disperindagkop dan PKM	- Pembinaan - Pelatihan
3.	Pengetahuan Pemasaran	Disperindagkop dan PKM	- Pembinaan organisasi - Pendaftaran - Perizinan - Pembinaan niaga - Kemitraan - Pembinaan koperasi
4.	Peningkatan Kreativitas	-	Secara khusus belum ada
5.	Peningkatan Prakarsa	-	Secara khusus belum ada
6.	Peningkatan Keuletan berusaha	-	Secara khusus belum ada
7.	Peningkatan Keberanian Berisiko	-	Secara khusus belum ada
8.	Peningkatan Kewirausahaan	- Disperindagkop dan PKM - Perguruan Tinggi - LSM - Disnaker	Pelatihan-pelatihan
9.	Layanan Permodalan	- Perbankan - BUMN	Promosi Pinjaman Modal terkait proyek

Sumber: Karsidi, 2003

Berikut diajukan pola alternatif hubungan antar peran masing-masing *stakeholder* UKM (Karsidi dan Irianto, 2005) yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan UKM:

1. UKM

UKM sebagai pelaku memegang peran yang sangat penting (pemegang kunci) dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri. Dalam memberdayakan UKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak (*stakeholder* yang lain) karena tanpa partisipasi UKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan. Namun demikian perlu disadari setiap program pemberdayaan harus berangkat pada pemenuhan kebutuhannya, meski kadang untuk menentukan kebutuhan tersebut membutuhkan pendampingan pula.

2. Kelompok/Koperasi

Beragamnya jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan beragam perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat masalah demi masalah, apakah ada masalah yang perlu penanganan secara kelompok atau dilakukan secara individual. Masalah permodalan misalnya akan lebih mudah penanganannya dengan sistem kelompok karena dapat mengurangi risiko dan memudahkan dalam pembinaannya. Kalau kelompok usaha mikro kemudian menjadi lebih besar dan teradministrasi dengan baik, maka kemudian dapat dikembangkan menjadi koperasi. Melalui koperasi diharapkan bisa memperkuat kekuatan tawar pasar baik dalam mendapatkan bahan baku, proses produksi, maupun penjualan produk. Demikian pula dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi lembaga koperasi akan dapat dinikmati oleh para anggotanya.

3. Asosiasi Usaha

Asosiasi Usaha dapat membantu UKM dalam berbagai aspek bagi anggotanya terutama dalam hal ini kaitannya dengan pasar akan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan, baik dalam penetapan harga maupun sistem pembayaran dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

4. Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank)

Salah satu masalah klasik pemberdayaan UKM adalah masalah kekurangan modal, namun UKM enggan untuk datang ke bank khususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Sebaliknya sering lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan "modal" yang dihimpun dari masyarakat tersebut dapat

tersalur kepada pengusaha UKM dengan aman. Artinya kedua belah pihak sebenarnya dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Untuk itu perlu diupayakan pendekatan baru perbankan terhadap UKM, yang salah satunya dengan pendekatan melalui Kelompok Simpan Pinjam (KSM) maupun kelompok usaha (koperasi) dalam memberikan layanan kredit terhadap UKM. Adanya pendekatan kelompok tidak akan efektif jika pandangan Bank terhadap UKM masih menggunakan paradigma lama bahwa kredit terhadap UKM tidak ekonomis dan berisiko.

Untuk itu perlu menggunakan paradigma baru, dimana UKM harus dipandang tidak sebagai pemanfaat kredit saja, namun juga sebagai sumber potensial tabungan. Secara lengkap perbandingan paradigma bank terhadap UKM disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Paradigma Perbankan terhadap UKM

No	Paradigma Lama	Paradigma Baru
1.	Mereka tidak punya potensi menabung	Mereka mempunyai potensi menabung
2.	Mereka akan aktif mendatangi bank	Bank perlu aktif menjemput bola
3.	Mereka memerlukan kredit murah	Mereka membutuhkan kemudahan memperoleh kredit/pelayanan Bank
4.	Perlu dana murah dari pemerintah untuk kredit	Bank perlu meningkatkan upaya mobilisasi tabungan
5.	Biaya pelayanan keuangan tinggi	Biaya dapat ditekan dengan pendekatan kelompok
6.	Kredit kepada mereka berisiko tinggi	Risiko dapat ditekan dengan pendekatan kelompok

Sumber: Karsidi dan Irianto, 2005.

Dengan pendekatan kelompok diharapkan memudahkan dalam pengelolaan kredit dan dapat menekan risiko sehingga secara keseluruhan menjadi layanan kredit yang ekonomis. Selain itu untuk membantu mengurangi risiko kredit macet, Bank dapat melakukan pendampingan usaha bagi kelompok UKM yang mengambil kredit pada Bank yang bersangkutan. Pendekatan ini memang membutuhkan waktu dan pemikiran lebih, sehingga untuk meringankan risiko dapat bekerjasama dengan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), yaitu model konsultan keuangan yang sekarang banyak didorong untuk berkembang dalam rangka memfasilitasi akses UKM terhadap permodalan.

5. Pasar

Pasar perdagangan hasil produksi UKM dapat berupa pasar dalam negeri (domestik) maupun pasar ekspor. Hubungan baik antara pelaku UKM dan pelaku pasar (pembeli maupun eksportir) perlu dijaga kesinambungannya. Demikian pula dengan adanya perubahan kondisi pasar harus cepat dapat diantisipasi. Dalam hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah, Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun Asosiasi usaha.

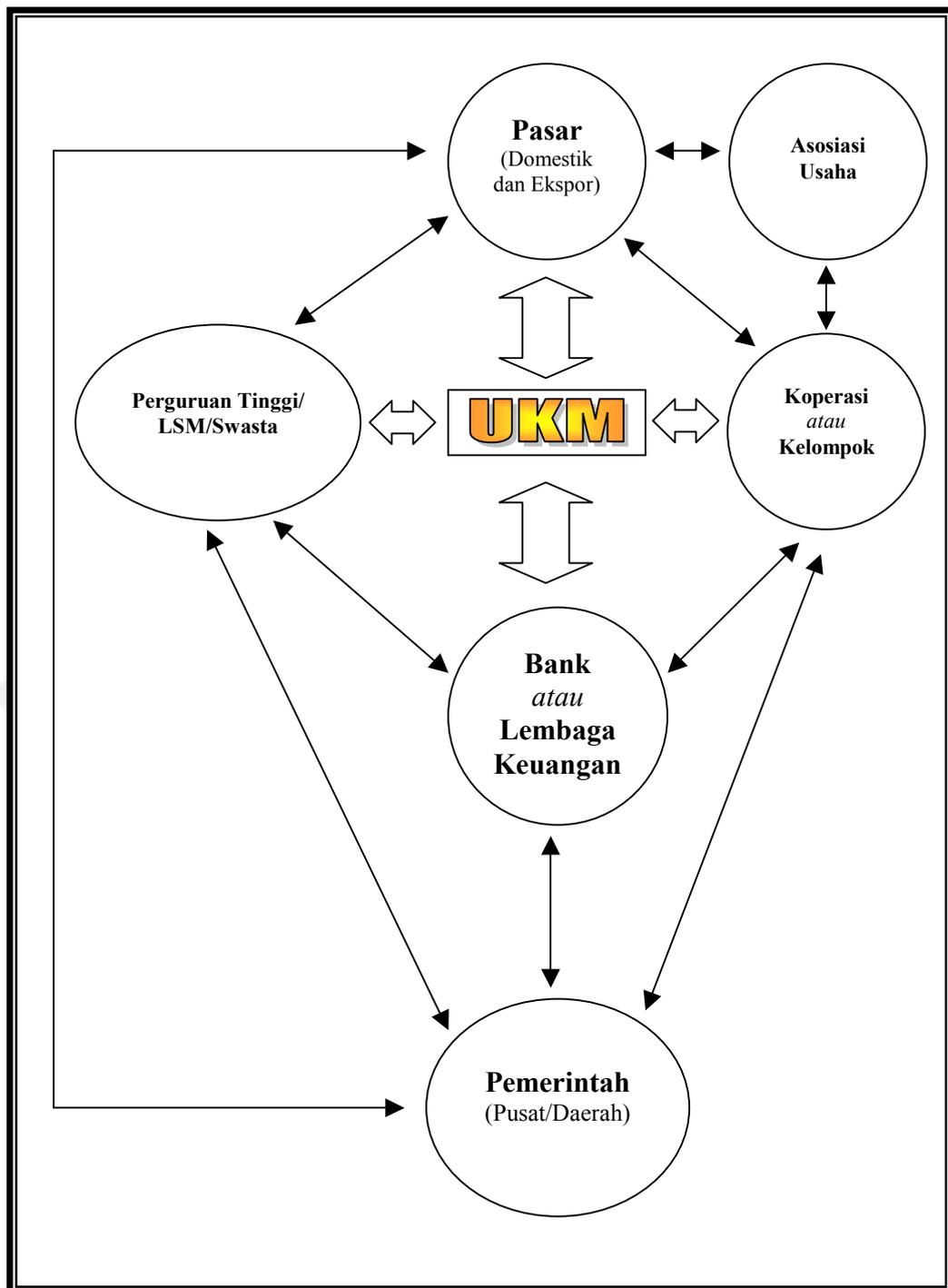
6. Pemerintah

Peran pemerintah dalam mengembangkan UKM maupun lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan UKM seperti koperasi, Asosiasi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Keuangan, dapat diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak terhadap pengembangan usaha UKM itu sendiri.

7. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi memiliki peran sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai aspek, yaitu: manajemen, produksi, pasar dan pemasaran bahkan sampai fasilitasi dalam menghubungkan UKM ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Idealnya jasa layanan yang diberikan Perguruan Tinggi harus dapat ditanggung pembiayaan oleh UKM sendiri, namun sampai saat ini belum banyak UKM yang menanggung atas jasa yang diterimanya.

Hubungan peranan antar unsur terkait (*Stakeholder*) dalam Pengembangan UKM di atas dapat dilukiskan seperti dalam gambar berikut:



Gambar 1

Hubungan Keterkaitan Peran antar *Stakeholder* UKM

#### D. LANGKAH-LANGKAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK UKM

Seperti dikatakan Korten (1980) di depan, bahwa titik pusat perhatian masa pasca industri adalah pada pendekatan ke arah pembangunan yang lebih *berpihak kepada rakyat*. Pembangunan yang memihak rakyat menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat. Perasaan berharga diri adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi.

Inilah awal mula pijakan bahwa pemberdayaan bagi masyarakat sangatlah penting (termasuk UKM), walaupun hal ini menurut Wirutomo, dkk (2003) bisa disebut sebagai hanya suatu konteks pemecahan masalah ketegangan hubungan antar negara (*state*) dengan masyarakat (*community*) yaitu untuk menggeser tanggungjawab negara dalam menanggulangi masalah (termasuk kemiskinan) di masyarakat. Hal tersebut menurutnya hanya bisa apabila didukung oleh kelembagaan lokal yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan dinamika dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan UKM terutama dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UKM sebagai pelaku maupun *stakeholder* lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak menitikberatkan pada metode "*bottom up*", dimana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan sasaran dan dilakukan secara partisipatif. Dalam praktek pemberdayaan UKM, untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran langkah-langkah yang dilakukan (Karsidi, 2005), adalah:

1. Identifikasi Potensi
2. Analisis Kebutuhan
3. Rencana Kerja Bersama
4. Pelaksanaan Program Kerja Bersama
5. Monitoring dan Evaluasi.

**Identifikasi potensi**, dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik Sumberdaya Manusia (SDM) UKM dan lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi dan Sumberdaya Alam (SDA) khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal UKM. Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayah masing-masing. Dalam identifikasi ini melibatkan *stakeholder* UKM dan tokoh masyarakat maupun instansi terkait.

**Analisis kebutuhan,** tahapan analisis ini dilakukan oleh perwakilan UKM yang dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait tentang berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar. Dengan pola analisis kebutuhan semacam ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya manifestasi kebutuhan UKM selaku individu pengusaha dan sebagai anggota kelompok. Dengan demikian antara individu pelaku UKM dan kelompok dapat diharapkan saling beriringan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kemajuan bersama.

**Rencana program kerja bersama,** setelah kebutuhan dapat ditentukan maka kemudian disusun sebuah rencana program kerja bersama untuk mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama. Dalam tahap ini baik Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait sebagai fasilitator.

**Pelaksanaan program kerja bersama,** jikalau program kerja telah disepakati maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program kerja. Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator, sedangkan Perguruan Tinggi/LSM/Swasta dapat bertindak selaku pemberi jasa konsultasi. Sebagai konsultan, idealnya Perguruan Tinggi harus mendapatkan jasa dari layanan yang diberikan kepada UKM.

Kebutuhan akan permodalan UKM salah satunya dapat dipenuhi dengan memperankan fungsi fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi pengrajin maupun kelompok. KKMB ini lahir sebagai perubahan paradigma baru terhadap UKM dari perbankan (*lihat tabel 2*), bahwa:

1. UKM mempunyai potensi menabung
2. Bank perlu aktif menjemput Bola
3. UKM membutuhkan kemudahan memperoleh kredit/layanan perbankan
4. Bank perlu memobilisasi tabungan dari UKM
5. Biaya dapat ditekan melalui pendekatan kelompok
6. Risiko dapat ditekan melalui pendekatan kelompok

Selain Bank memberikan kredit sebagai tugas utamanya, Bank dapat membantu UKM dengan memberikan pendampingan (*Technical Assistant/TA*) baik dilakukan oleh Bank sendiri atau bekerjasama dengan pendamping yang dibentuk oleh Perguruan Tinggi/LSM/Swasta.

**Monitoring dan evaluasi,** berfungsi tidak saja untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, namun juga untuk membuat

penyesuaian-penyusuaian jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.

## E. PENGALAMAN EMPIRIS

### 1. Pengalaman BDS LPPM UNS Mendampingi Sentra Meubel Bulakan Sukoharjo

Penduduk Desa Bulakan berjumlah 6.336 jiwa, dan sebanyak  $\pm$  518 jiwa diantaranya berprofesi sebagai pengrajin kayu, baik sebagai pengrajin meubel setengah jadi (mentah), sudah sampai *finishing*, maupun siap ekspor. Tenaga kerja yang terlibat di dalam sentra secara keseluruhan  $\pm$  sejumlah 2.800 tenaga kerja. Tenaga kerja ini bukan hanya berasal dari wilayah sekitar Bulakan tetapi juga berasal dari Jepara, Pacitan, Wonogiri, maupun Gunung Kidul.

Begitu besar potensi yang ada di sentra Bulakan ini mendorong LPM-UNS melalui BDS untuk melakukan pendampingan dan pembinaan mulai tahun 2000 yang lalu. Model pendampingan dilakukan melalui mekanisme kelembagaan dengan pembentukan Koperasi Bulakan sebagai peleburan dari 3 koperasi yang ada sebelumnya. Pendampingan dilakukan dengan cara formal maupun informal seperti mengadakan pelatihan, manajemen informasi, pertemuan rutin dan diskusi maupun secara informal melalui kegiatan kunjungan ke sentra.

Untuk mendukung aspek permodalan UKM tahun 2001, BDS LPM-UNS bersama Koperasi Bulakan sebagai lembaga usaha wadah para pengrajin mengajukan dan mendapat dana dari Modal Awal Penyertaan (MAP) Kantor Menekop dan UKM.

Modal MAP ini belum bisa mencukupi kebutuhan modal kerja para pengrajin di Sentra Bulakan, maka pada tahun 2002 BDS LPM-UNS dan Koperasi Bulakan melakukan kerjasama dengan Bukopin untuk lebih memperkuat permodalan. Kerjasama ini diwujudkan dengan mendirikan SWAMITRA sebuah lembaga simpan pinjam khusus untuk para pengrajin di sentra "Bulakan". SWAMITRA ini komposisi modalnya terdiri dari Koperasi Bulakan Rp. 15.000.000,- - ditambah modal dari MAP sebesar Rp. 200.000.000,-- kemudian Bukopin mengalokasikan kredit sebesar Rp. 250.000.000,-- atau lebih. Keuntungan dengan mendirikan SWAMITRA adalah semakin bertambahnya modal simpan pinjam juga kuatnya manajemen. Hal ini didukung secara langsung oleh Bukopin dengan teknologi perbankan, sehingga mampu mengurangi tingkat kemacetan kredit. Model ini mungkin baru pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Perjanjian SWAMITRA dilakukan oleh tiga pihak. *Pertama* Koperasi Bulakan mewakili para pengrajin sekaligus menjadi sasaran pembinaan dan

pendampingan. *Kedua*, BDS LPM-UNS sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pendampingan (*technical assistant/TA*) meliputi :

- Akses layanan pola kemitraan.
- Akses layanan marketing.
- Layanan pengembangan Sumberdaya Manusia.
- Akses layanan pengembangan teknologi.
- Akses layanan peningkatan permodalan.

*Ketiga*, Bukopin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pendampingan manajemen serta mencukupi kebutuhan kredit bagi para pengrajin.

Setelah 5 tahun, diharapkan Koperasi Bulakan bisa mandiri dan mampu lepas dari Bukopin maupun BDS LPM-UNS, sehingga bisa melakukan pengelolaan usaha sendiri seiring dengan kemampuan SDM serta modal yang dimiliki.

Dalam rangka menuju kemandirian pengrajin, pada tahun 2004 dilakukan pembentukan Forum Rembug Klaster yang kepengurusannya terdiri dari semua *stakeholder* yang ada, yaitu pengrajin, BDS maupun instansi terkait di Kabupaten Sukoharjo. Forum rembug klaster ini setiap bulan mengadakan pertemuan membahas perkembangan kluster, pelaksanaan program kerja dan pemecahan berbagai kendala yang terjadi di lapang. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan seluruh *stakeholder* UKM. Dari Forum rembug Klaster ini diharapkan dapat dilakukan analisis kebutuhan, pengembangan program berdasarkan potensi local yang ada dan menjawab tantangan usaha yang menghadang bersama.

Kini, telah terlihat hasilnya bahwa Sentra Meubel Bulakan telah menjadi pemacu kegiatan ekonomi masyarakat sekitar terutama ekspo, karena tidak kurang dari 1.500 pengrajin ada disana.

## **2. Pengalaman BDS LPPM Mendampingi Sentra Meubel Serenan Klaten**

Sentra Meubel Serenan secara administrasi masuk wilayah kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, meskipun secara geografis terletak di sebelah barat desa Bulakan dan hanya terpisah oleh sungai Bengawan Solo. Sentra Serenan ini secara historis lebih tua dibandingkan dengan sentra Bulakan, bahkan banyak pengrajin Bulakan dulunya sebagai pekerja di sentra Serenan.

Sejak tahun 2001 bersama JICA Jepang, BDS LPPM UNS berpartisipasi sebagai mitra lokal untuk pemberdayaan di sentra Serenan. BDS LPPM UNS, JICA, Pemerintah Kabupaten Klaten cq. Deperindagkop beserta masyarakat pengrajin membentuk Badan Kerjasama (BKS) Serenan untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan pendampingan maupun berbagai pelatihan. Sejak

tahun 2001 telah dilakukan berbagai pelatihan terkait dengan pemilihan bahan baku, proses produksi, administrasi usaha maupun kelembagaan kelompok, pameran produk dan studi banding tokoh masyarakat ke Jepang.

Pada tahun 2003, JICA Jepang meninggalkan sentra Serenan dan pendampingan dilaksanakan oleh BDS LPPM UNS dan Dinas Perindagkop. Pada tahun 2003 mulai terbentuk Koperasi pengrajin kayu "**Manunggal Jaya**". Koperasi ini bergerak dalam penyediaan bahan baku, permodalan dan pemasaran. Bahkan pada tahun 2003 itu telah berhasil melakukan penjualan ekspor dengan bekerjasama dengan salah satu eksportir.

Dalam rangka pengembangan usaha UKM, maka pada tahun 2004 BDS LPPM UNS bekerjasama dengan BTN memberikan kredit sekaligus memberikan pelatihan manajemen bagi anggota koperasi. Dalam hal ini BDS bertindak selaku KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) sebagai *channeling* sekaligus bertindak memberikan *technical assistant* (TA). Pada tahun 2004 pula berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi terlihat bahwa memungkinkan pemanfaatan limbah potongan kayu yang jumlahnya cukup banyak menjadi produk yang bernilai ekonomi, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pengrajin meubel. Dari hasil analisis dan kesepakatan tersebut maka pengolahan limbah kayu dilakukan oleh "anak-anak" pengrajin untuk dijadikan produk souvenir berupa miniatur berbagai kendaraan dan miniatur meubel. Pada saat ini produk souvenir telah mempunyai pelanggan yang memasarkan ke berbagai daerah. Sentra ini, kini telah dikenal sebagai sentra produsen meubel dan souvenir kayu yang besar dan terkenal di wilayah Surakarta.

## F. PENUTUP

Pemberdayaan Masyarakat untuk UKM hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, yaitu: belajar dari masyarakat, pendamping sebagai fasilitator dan dapat tercipta saling belajar dan berbagi pengalaman.

Dari dua pengalaman empiris tersebut pelajaran yang dapat diambil yaitu bahwa kerjasama antar *stakeholder* akan menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk pengembangan UKM. Untuk itu, maka program-program yang menyangkut pengembangan UKM baik yang bersifat *technical asistant* (TA) maupun yang non TA harus diupayakan adanya koordinasi dan berbagi peran antar *stakeholder* agar optimal hasilnya.

Untuk itu diperlukan analisis pemenuhan kebutuhan dan *needs assessment* yang tepat bagi usaha pemberdayaan masyarakat untuk UKM. Langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan cara mendorong terjadinya partisipasi masyarakat sasaran, antara lain melalui: identifikasi potensi, analisis kebutuhan, rencana kerja bersama, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Implementasi kebijakan dalam rangka strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan UKM tidak bisa secara parsial hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun juga harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan UKM baik secara individu maupun kelompok termasuk mendasarkan pada potensi sumberdaya manusianya. Dengan melibatkan secara partisipatif dan lebih bersifat **bottom up** ternyata partisipasi UKM untuk pemberdayaan diri mereka sendiri akan berhasil dan pada gilirannya secara intergral akan mampu memberikan dampak perkembangan bagi perekonomian wilayah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- BDS LPPM UNS. 2005. *Pasar Keuangan Mikro*. Pelatihan Kredit Usaha Mikro dan Kecil Bagi Bank Umum. Kerjasama LPPM UNS dengan BI Kediri.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (Terj. AA. Nugroho), Jakarta: PT. Gramedia.
- Karsidi, Ravik. 1988. *Perorganisasian Potensi Pembangunan Masyarakat, Suatu Model Menumbuhkan Partisipasi*. Makalah. KNPI Surakarta.
- , 2003. *Dari Petani Ke Pengrajin (Sebuah Studi Transformasi Pekerjaan)*. Surakarta. LPM UNS dengan PT. Pustaka Caraka.
- , dan Heru Irianto. 2005. *Strategi Pemberdayaan UMKM di Wilayah Surakarta*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II Surakarta Propinsi Jawa Tengah. Solo 30 Juni 2005.
- , 2005. Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia UMKM di Era Otonomi Daerah, Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke 22 UNIBA. Solo, 20 Agustus 2005.
- Korten, David C., 1980, *Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach*, Public Administration Review, September/October 1980 p.480-509.
- , 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Sikhondze, Wilson B. 1999. *The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland*, Journal: Edult Education and Development No. 53/1999, Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn : 112/DVV.
- Wirutomo, Paulus, dkk. 2003. *Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah. (Memanusiakkan Manusia)*. Jakarta: Penerbit CV. Cipruy.